

**Implementasi Kebijakan Layanan Penitipan Barang dan Video Call
Sebagai Pengganti Layanan Kunjungan Pada Masa Pandemi Covid-19
di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kayu Agung*****Implementation of Storage Services and Video Call Policy as a Replacement
for Prison Visits during COVID-19 Pandemic at Class II B Correctional
Institution of Kayu Agung*****Lisdiana ¹⁾, Deby Chintia Hestiriniah ²⁾, Reza Meidiansyah Purnama ^{3*)}**¹ STISIPOL Candradimuka, Indonesia² STISIPOL Candradimuka, Indonesia³ Program Studi Magister Administrasi Publik, STISIPOL Candradimuka, Indonesia

*E-mail :Reza37oke@gmail.com

ABSTRAK

Adanya layanan penitipan barang dan video call sebagai Pengganti Layanan Kunjungan Pada Masa Pandemi Covid-19 tentunya akan berdampak positif bagi tahanan dan narapidana yaitu dalam pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan Corona Virus Disease (Covid-19) dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemasyarakatan pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan secara efektif. Adapun tata tertib penitipan barang antara lain: Wajib memiliki kartu tanda penduduk, Berpakaian dan bersikap sopan, Memakai masker, Setiap orang hanya diperbolehkan membawa 1x barang titipan untuk warga binaan pemasyarakatan, Dilarang membawa barang titipan yang berlebihan serta Dilarang membawa barang yang tidak diperkenankan oleh petugas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Layanan Penitipan Barang dan Video call sebagai Pengganti Layanan Kunjungan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kayu Agung. Masalah dalam penelitian adalah Masih kurangnya sumber daya manusia bagian penitipan barang serta Prasarana penitipan barang masih kurang yaitu alat X-Ray karena selama ini penitipan barang masih secara manual. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara keseluruhan Implementasi Kebijakan Layanan Penitipan Barang dan video call sebagai Pengganti Layanan Kunjungan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kayu Agung sudah dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, meskipun masih terdapat hambatan/ kendala dalam pelaksanaannya seperti masih kurangnya sumber daya manusia bagian penitipan barang serta sarana penitipan barang masih kurang yaitu alat X-Ray karena selama ini penitipan barang masih secara manual.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Layanan Penitipan Barang**ABSTRACT**

The existence of goods storage services as a substitute for visiting services during the Covid-19 pandemic certainly has a positive impact on prisoners and convicts, namely to prevent and break the chain of spread of Corona Virus Disease (Covid-19) in the implementation of Correctional Duties and Functions at the Correctional Technical Implementing Unit. effectively. The procedures for safekeeping of goods include: Mandatory to have an identity card, Dress and be polite, Wear a mask, Everyone is only allowed to bring 1x deposit for correctional inmates, Forbidden to bring excessive deposited goods and Forbidden to bring items that are not allowed by the officer . The purpose of this study was to analyze the Implementation of the Goods Custody Service and video call Policy as a Substitute for Visiting Services during the Covid-19 Pandemic Period at the Kayu Agung Class IIB Correctional Institution. The problem in the research is the lack of human resources for the

storage of goods and the lack of goods storage infrastructure, namely X-Ray tools because so far the storage of goods is still manual. The data analysis technique used in this research is qualitative data analysis technique. This study concludes that the overall implementation of the Goods Custody Service and video call Policy as a Substitute for Visiting Services During the Covid-19 Pandemic Period at the Class IIB Kayu Agung Penitentiary has been carried out properly, although in its implementation there are still obstacles/constraints such as the lack of human resources in the section Storage of goods and video call and goods storage infrastructure is still lacking, namely X-Ray tools because so far the storage of goods is still manual.

Keywords: *Implementation, Policy, Safekeeping Services*

PENDAHULUAN

Dalam rangka mengurangi dampak dari penyebaran dan penularan yang cepat dari wabah penyakit Corona Virus Disease (Covid-19), Kemenkumham telah mengembangkan kebijakan berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SEK-02.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia RI dan Instruksi Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor : PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pencegahan, Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan Corona Virus Disease (Covid-19) Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan. Kelebihan kapasitas (*overcapacity*) terus menjadi masalah di penjara. Karena *overcapacity* selama pandemi covid-19, Lapas harus menetapkan kebijakan baru untuk mencegah penyebaran Covid-19. Salah satu cara untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Lapas adalah melalui kebijakan pelayanan penitipan barang sebagai Pengganti Layanan Kunjungan Pada Masa Pandemi Covid-19. Dalam hal ini adalah penutupan pelayanan kunjungan dan menggantinya dengan pelayanan penitipan barang, hal ini dilakukan agar narapidana dapat terus menyampaikan simpati dan kepedulian terhadap keluarganya kepada narapidana disamping kebijakan-kebijakan yang diikuti, adalah menawarkan layanan video call untuk meredakan kerinduan. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Nomor :

Pas-20.Pr.01.01 Tahun 2020 Tentang Langkah Progresif Dalam Penanggulangan Penyebaran Virus Corona Disease (Covid-19) Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan aturan ini berlaku untuk semua Lapas dan Rutan di Indonesia. Surat edaran ini di buat dan tangani oleh PLT dirjen pas bapak Nugroho pada tanggal 26 Maret 2020 berlaku mulai tanggal 28 Maret 2020 hari ini. Berdasarkan identifikasi berbagai permasalahan tersebut dan mempertimbangkan pentingnya Implementasi Kebijakan Layanan Penitipan Barang sebagai Pengganti Layanan Kunjungan Pada Masa Pandemi Covid-19, maka peneliti ingin mengadakan penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Layanan Penitipan Barang sebagai Pengganti Layanan Kunjungan Pada Masa Pandemi Covid-19. Permasalahan dalam penelitian ini adalah;

- a. Masih kurangnya SDM bagian penitipan barang.
SDM bagian penitipan barang hanya berjumlah 3 orang. Jumlah ini tidak sebanding dengan jumlah pengguna layanan penitipan barang dalam satu hari yang rata-rata berjumlah 50-70 orang. Seharusnya jumlah Ideal jumlah Sumber daya manusia bagian penitipan barang yaitu berjumlah 6 orang Sarana penitipan barang masih kurang.
- b. Prasarana penitipan barang masih kurang yaitu alat X-Ray karena selama ini penitipan barang masih secara manual.

Tujuan dari penelitian ini guna menganalisis Implementasi Kebijakan Layanan Penitipan Barang dan Video Call sebagai Pengganti Layanan Kunjungan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Lapas Kayu Agung.

Kebijakan Publik

Berdasarkan Gothen (1996: 230), kebijakan public secara khusus berkaitan dengan tujuan yang ditetapkan oleh proses politik dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat dalam wilayah administrasi tertentu. Menurut Hoogerwerf (1983: 9), kebijaksanaan pemerintah adalah kebijakan kelompok aktor tertentu, yaitu pejabat publik dan lembaga pemerintah.

Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III

Berdasarkan George C. Edward III (Islamy: 1996: 65), implementasi dipengaruhi beberapa faktor yang saling berhubungan yaitu :

- a) **Komunikasi** , transmisi pesan/informasi antara dua orang ataupun lebih melalui media/saluran komunikasi, yang dapat menghasilkan respon terhadap pesan//informasi tersebut.
- b) **Sumber daya** , wewenang untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut diterapkan sebagaimana dimaksud.
- c) **Disposisi** , jika implementor berorientasi dengan baik, ia dapat mengimplementasikan kebijakan yang diinginkan oleh pengambil keputusan. Jika karakter atau cara pandang pelaksana tidak sinkron dengan pengambil keputusan, proses implementasi kebijakan juga tak akan efektif.
- d) **Struktur Birokrasi** , birokrasi sebenarnya dipahami sebagai wacana Negara untuk memberikan pelayanan publik sesuai dengan kehendak rakyat. Birokrasi adalah jenis organisasi yang menangani semua tugas administrasi

penting secara sistematis (tertib) dengan mengkoordinasikan pekerjaan banyak orang.

Definisi operasional adalah pedoman kerja tentang bagaimana mengukur suatu variabel, bagaimana suatu variabel diukur (Singarimbun dan Effendi, 1995: 46). Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan dengan *George C. Edwards* (Tangkilisan, 2003:11-12), indikator yang digunakan :

1. Komunikasi
 - a. Transmisi
 - b. Kejelasan
 - c. Konsistensi
2. Sumber Daya
 - a. SDM
 - b. Sarana dan Prasarana
 - c. Dana/Anggaran
3. Disposisi/Sikap
 - a. Tanggung Jawab
 - b. Disiplin
 - c. Integritas
4. Struktur Birokrasi
 - a. Mekanisme Kerja/SOP
 - b. Fragmentasi

METODE PENELITIAN

Penelitian ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Layanan Penitipan Barang sebagai Pengganti Layanan Kunjungan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Lapas Kelas IIB Kayu Agung, maka jenis penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian eksplanatori (*explanatory research*) dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara, dokumentasi dan observasi. Analisis data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teori Miles, Huberman dan Saldana (2014 : 14) dengan (3) tiga langkah : kondensasi data, menyajikan

data dan menarik simpulan atau verifikasi. Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan (*selecting*), pengerucutan (*focusing*), penyederhanaan (*simplifying*), peringkasan (*abstracting*) dan transformasi data (*transforming*). Secara lebih jelas, langkah-langkah sesuai teori Miles, Huberman dan Saldana (2014 :14).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kajian yang ada tentang Implementasi Kebijakan Layanan Penitipan Barang sebagai Pengganti Layanan Kunjungan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasarakatan Klas II B Kayu Agung, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Implementasi Kebijakan Layanan Penitipan Barang sebagai Pengganti Layanan Kunjungan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasarakatan Klas II B Kayu Agung sudah dilaksanakan dengan baik, walaupun masih terdapat kendala/keterbatasan dalam pelaksanaannya seperti masih kurangnya SDM untuk menyimpan barang dan kurangnya sarana prasarana untuk menyimpan barang yaitu alat X-Ray karena selama ini penitipan barang masih manual. Lebih jelasnya dijelaskan dibawah ini :

1. Komunikasi

a. Transmisi

Transmisi dalam Kebijakan Penyelenggaraan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kayu Agung telah dilaksanakan dengan semestinya. Hal ini terlihat dari aspek transmisi dalam implementasi kebijakan Layanan Penitipan Barang sebagai Pengganti Layanan Kunjungan dikomunikasikan kepada pihak terkait, serta staf Lembaga Pemasarakatan Klas II B Kayu Agung dan kepada institusi dan masyarakat umum, yang merupakan kelompok sasaran(target

group) dari kebijakan tersebut

b. Kejelasan

Informasi tentang kebijakan Layanan Penitipan barang sudah jelas dan dapat dipahami oleh para petugas lapas yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat/ keluarga narapidana. Keluarga narapidana/masyarakat juga dapat memahami dengan jelas informasi atau penjelasan yang disampaikan oleh petugas Lembaga Pemasarakatan Klas II B Kayu Agung tentang persyaratan administrasi Penitipan Barang dan prosedur pelayanan Penitipan Barang, sehingga mereka dapat melaksanakan semua persyaratan dan prosedur pelayanan Penitipan Barang.

c. Konsistensi

Konsistensi telah dilaksanakan dengan semestinya. Hal ini dapat dilihat dari Informasi atau penjelasan tentang layanan Penitipan Barang sebagai Pengganti Layanan Kunjungan Pada Masa Pandemi Covid-19 disampaikan secara konsisten oleh petugas Lembaga Pemasarakatan Klas II B Kayu Agung sesuai dengan apa yang telah ditetapkan atau tertuang dalam kebijakan tersebut, baik menyangkut persyaratan administrasi untuk setiap jenis layanan, tentang prosedur pelayanan, waktu pelayanan, dan hal-hal lainnya berkenaan dengan pelaksanaan Layanan Penitipan Barang sebagai Pengganti Layanan Kunjungan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasarakatan Klas II B Kayu Agung.

2. Sumber Daya

a. SDM

Secara kualitas SDM dalam Kebijakan Layanan Penitipan Barang sudah cukup memadai, apalagi yang bertugas memberikan Kebijakan Layanan Penitipan Barang seluruhnya berpendidikan sarjana dan pelatihan

diselenggarakan. Meskipun secara kuantitas, jumlah sumber daya bagian penitipan barang masih kurang. Sumber daya manusia bagian penitipan barang hanya berjumlah 3 orang yang terdiri dari Petugas administrasi layanan kunjungan sebanyak 2 orang

b. Sarana dan Prasarana

Sarana yang sudah ada antara lain Ruang pendaftaran, Ruang laktasi bagi ibu menyusui, Pojok bacaan ruang bermain anak, Mushola, Sedangkan prasarana yang sudah ada antara lain Thermogan, Hand sanitizer, Nomor antrian, Sarung tangan plastik dan kantong plastik karet, Metal detector, Atk berupa kertas pena spidol, Komputer serta Printer. Akan tetapi Prasarana penitipan barang masih kurang yaitu alat X-Ray karena selama ini penitipan barang masih secara manual

c. Dana/anggaran

Dalam Kebijakan Layanan Penitipan Barang sebagai Pengganti Layanan Kunjungan Pada Masa Pandemi Covid-19 telah dianggarkan dana/ anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang besarnya Rp.260.000.000/ tahun, digunakan untuk membeli prasarana seperti karet gelang kantong plastik hand sanitizer dan lain-lain sebesar Rp 235.000.000. Sedangkan dana/ anggaran yang digunakan untuk membeli sarana seperti untuk kebersihan kita membeli berbagai macam alat seperti pewangi ruangan kemudian juga sabun dan lain-lain sebesar Rp 25.000.000/ tahun.

3. Disposisi/sikap

a. Tanggung Jawab

Dalam Kebijakan Layanan Penitipan Barang sebagai Pengganti Layanan Kunjungan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasarakatan Klas II B Kayu Agung dilaksanakan sesuai dengan kewajiban yang telah

ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari Tanggung jawab di dalam pelaksanaan pelayanan titipan barang di Lembaga Pemasarakatan Klas II B Kayu Agung menjadi tanggung jawab dari semua pihak karena pelayanan itu sendiri ialah sebuah representasi daripada pelayanan yang ada di Lembaga Pemasarakatan Klas II B Kayu Agung sehingga seluruh pegawai memiliki tanggung jawab yang sama

b. Disiplin

Disiplin di dalam pelayanan penitipan barang ini terus dijaga dan diawasi oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal yang bertugas sebagai satuan operasi kepatuhan internal yang memastikan setiap layanan maupun tingkah laku daripada pegawai di Lapas Kayuagung ini dapat terjaga dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Dirjen Pemasarakatan Nomor PAS-1052.PK.02.10.02 Tahun 2020 yang memuat tugas dari Tim Satops Patnal diantaranya merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, melaporkan dan menindaklanjuti kegiatan pencegahan Serta penindakan, supervisi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelanggaran prosedur, penyalahgunaan wewenang dan gangguan kamtib pada bidang perawatan, pembinaan, pembimbingan, pengelolaan basan dan baran, pengamanan dan pembinaan kepegawaian

c. Integritas

Melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Sesuai dengan Permenpan RB nomor 10 Tahun 2019. Integritas dalam hal pelayanan penitipan barang ini sendiri terus diawasi dan diberikan motivasi agar tidak turun. Contoh konkrit di dalam hal ini dalam setiap apel pimpinan selalu memberikan

masuk-masukan serta mengingatkan tentang bagaimana sebuah budaya pelayanan publik harus dijalankan dalam hal ini untuk pelayanan penitipan barang

4. Struktur Birokrasi

a. Mekanisme kerja/SOP

Kebijakan Layanan Penitipan Barang sebagai Pengganti Layanan Kunjungan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Lembaga Masyarakat Kelas II B Kayu Agung sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur atau mekanisme kerja/ SOP yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Masyarakat melalui Keputusan Direktur Jenderal Masyarakat Nomor PAS-36.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Masyarakat.

b. Fragmentasi

Fragmentasi telah dilakukan dengan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari Fragmentasi di dalam pelayanan penitipan barang ini terbagi menjadi beberapa tahapan yaitu 1) penerapan protokol kesehatan sebagai bagian awal daripada standar pelayanan 2) pengambilan nomor antrian 3) administrasi terhadap biodata daripada si pengunjung, 4) barang-barang apa saja yang dibawa 5) tujuan daripada barang yang akan dikirimkan dan 6) pengeledahan barang.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan Implementasi Kebijakan Layanan Penitipan Barang dan video call sebagai Pengganti Layanan Kunjungan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Lapas Kelas IIB Kayu Agung sudah dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan/ kendala seperti Masih kurangnya sumber daya manusia

bagian penitipan barang serta Prasarana penitipan barang masih kurang yaitu alat X-Ray karena selama ini penitipan barang masih secara manual. Untuk lebih jelasnya, berikut ini rinciannya:

1. Komunikasi seluruh aspeknya sudah tercapai seperti yang dijelaskan baik itu syarat dan juga SOP
2. SDM belum memadai meliputi SDM yang kurang yang saat ini terdapat 2 orang petugas pendaftaran dan 1 orang petugas pengeledahan dimana idealnya sebanyak 6 orang dan sarana belum memadai yaitu mesin X Ray
3. Disposisi / sikap, aspeknya sudah tercapai seperti yang sudah dijelaskan
4. Struktur Birokrasi, sudah tercapai dimana para pengguna layanan telah mengetahui SOP Layanan baik itu waktu dan barang-barang yang akan dititipkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi. (1999). *Psikologi Sosial*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Anderson, J.E. 1978. *Public Policy Making*. Holt Rinehart And Windton: Newyork
- Budiarjo, Meriam. 1992. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Putaka
- Cangara, Hafied. 2000. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dida, S., Damayanti, T., & Koswara, A. (2021). *Representasi Indonesia pada penanganan COVID-19 di media asing*. 5(2), 186–207.
- Fahmi, Ali. 2003. *Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir dalam Upaya Meningkatkan PAD*. Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang: Ilmu Administrasi Negara
- Lewis A. Gunn and Brian W. Hogwood. 1983. *Policy analysis for the real world*. Oxford : Oxford University Press

- Hadiwardoyo, W., Tinggi, S., Ekonomi, I., & Barat, J. (n.d.). *Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19*. 83–92. <https://doi.org/10.24853/baskara.2.2.83-92>
- Hoogerwerf. 1983. *Isi dan Corak-corak Kebijaksanaan*. Jakarta: Erlangga
- Islami, M. Irfan. 1994 dan 1997. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Isworo, Waluyo Iman. 1996. *Beberapa Pendekatan dan Analisis dan Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kumorotomo, Wahyudi. 1999. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Lineberri, Robert. 1978. *American Public Policy*. North Western University Harpen And Row. Newyork
- Mazmanian, Daniel dan Sabartier, Paul. 1993. *Implementation And Public Policy*. USA: Forsman And Company
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implemantasi dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia
- Santoso, Priyo Budi. 1988. *Birokrasi Pemerintahan Orde Baru Perspektif Kultural dan Struktural*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Singarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES
- Straussand J. Corbin. 1990. *Qualitative Research; Grounded Theory Procedure and. Techniques*. London: Sage Publication
- Sugiyono. 1999. *Metode Penelitian Asministrasi*. Bandung: CV Alfabeta
- Tangkilisan, Hessel Nogi. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus*, Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI.
- Thoha, Miftah. 1992. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Wahab, Abdul. 1991 dan 1997. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wardah, K., & Kota, D. I. (2020). *Jurnal ilmiah akuntansi, manajemen & ekonomi islam (jam-ekis) volume 3, no.2, juli 2020*. 3(2), 73–89.